

DOKUMEN JAWABAN PERTANYAAN EVALUASI PUG 2023



Kategori: Kementerian

Nama: Kementerian Luar Negeri

Nilai Evaluasi PUG: 954.82

PELEMBAGAAN PUG

Nilai Maksimal: 155.00

1. PELEMBAGAAN PUG

1. Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG

Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan sebagai landasan hukum Penyelenggaraan PUG secara komprehensif?

Nilai Maksimal: 30.00

Nilai: 30.00

Jawaban:

Ya, dalam bentuk apa? (Lampirkan)

- ☒ 1) Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
☐ 2) Lainnya

☐ Tidak

Catatan:

Kemlu telah memiliki regulasi sebagai landasan hukum komprehensif dan bentuk komitmen penyelenggaraan PUG dengan ditetapkan dan diundangkannya:

- Peraturan Menlu No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kemlu;
- Keputusan Menteri No. 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kemlu dan Perwakilan RI; dan
- Surat Edaran Menlu No. SE/00031/KP/11/2021/03 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Kemlu dan Perwakilan RI.

1. Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG

Apakah regulasi/kebijakan Penyelenggaraan PUG oleh K/L sudah mengintegrasikan gender secara komprehensif ke seluruh 7 (tujuh) proses pembangunan?

Nilai Maksimal: 30.00

Nilai: 30.00

Jawaban:

Ya (Sebutkan dan Lampirkan)

- ☒ 1) Perencanaan
☒ 2) Penganggaran
☒ 3) Pelaksanaan
☒ 4) Pemantauan
☒ 5) Evaluasi
☒ 6) Pengawasan
☒ 7) Pelaporan

☐ Tidak

Catatan:

Regulasi penyelenggaraan PUG di Kemlu telah mengintegrasikan gender secara komprehensif ke semua 7 proses pembangunan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Ketujuh proses pembangunan tersebut menjadi lingkup dan dimuat dalam pasal-pasal dari:

- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
- Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

- Perencanaan disebutkan dalam Permenlu 21/2020 pada Pasal 4-7 dan Lampiran serta Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021
- Penganggaran disebutkan dalam Permenlu 21/2020 pada Pasal 7, 11, dan 16 dan Lampiran serta Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021
- Pelaksanaan disebutkan dalam Permenlu 21/2020 pada pasal 8-11 dan Lampiran serta Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021
- Pemantauan disebutkan dalam Permenlu 21/2020 pada pasal 15 dan Lampiran serta Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021
- Evaluasi disebutkan dalam Permenlu 21/2020 pada pasal 8, 11-15 dan Lampiran serta Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021
- Pengawasan disebutkan dalam Permenlu 21/2020 pada pasal 8, 11 dan Lampiran serta Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021
- Pelaporan disebutkan dalam Permenlu 21/2020 pada pasal 12-15 dan Lampiran serta Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L memiliki SDM terlatih PUG?

SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG

1) Jumlah SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG

2) Sebutkan rincian jumlah SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG di masing-masing UKE I

3) Persentase UKE I yang memiliki SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi dan tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Ya, Data tersedia. Lampirkan!
☐ Tidak

Catatan:

Nilai= 100%

Seluruh SDM Kementerian Luar Negeri (Pusat dan Perwakilan RI), termasuk SDM Perencana telah terlatih subtransi terkait konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan, penganggaran responsif gender, dan parameter kesetaraan gender.

Berikut rincian Data SDM Perencana terlatih PUG Kemlu Tahun 2022:

- 1) Jumlah SDM Perencana dan Penganggaran = 116 orang (50 laki-laki dan 66 perempuan)
- 2) Rincian jumlah SDM Perencana dan Penganggaran di masing-masing UKE I (data terlampir)
- 3) Persentase UKE I yang memiliki SDM Perencana dan Penganggaran = 100%

Di tahun 2022, Kemlu telah melaksanakan Bimtek PUG untuk seluruh Satker Pusat dan Perwakilan RI dan secara khusus telah melaksanakan pelatihan Training of Trainers untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) secara luring di Pusdiklat Kemlu pada tanggal 29-20 Juni dan 1 Juli 2022. Kegiatan diikuti oleh 20 Pejabat dari 8 Satuan Kerja Eselon I, 6 Satuan Kerja Eselon II Sekretariat Jenderal (laporan dan sertifikat terlampir). Seluruh peserta Bimtek dan TOT tersebut telah menjadi bagian integral dalam memberikan pemahaman seluruh SDM di Satker masing-masing terkait pelaksanaan PUG di Kemlu.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L memiliki SDM terlatih PUG?

SDM Teknis

- 1) Jumlah SDM Teknis terlatih PUG
- 2) Sebutkan rincian jumlah SDM Teknis terlatih PUG di masing-masing UKE I
- 3) Persentase PD yang memiliki SDM Teknis terlatih PUG

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, Data tersedia. Lampirkan!

☐ Tidak

Catatan:

Nilai=100%

Seluruh SDM Kementerian Luar Negeri (Pusat dan Perwakilan RI), termasuk SDM Teknis/Pelaksana telah terlatih subtransi terkait konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan, penganggaran responsif gender, dan parameter kesetaraan gender.

Berikut rincian Data SDM Teknis terlatih PUG Kemlu Tahun 2022:

- 1) Jumlah SDM Teknis terlatih PUG = 196 orang
- 2) Rincian jumlah SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG di masing-masing UKE I (data terlampir)
- 3) Persentase UKE I yang memiliki SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG = 100%

Di tahun 2022, Kemlu telah melaksanakan Bimtek PUG untuk seluruh Satker Pusat dan Perwakilan RI dan secara khusus telah melaksanakan pelatihan Training of Trainers untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) secara luring di Pusdiklat Kemlu pada tanggal 29-20 Juni dan 1 Juli 2022. Kegiatan diikuti oleh 20 Pejabat dari 8 Satuan Kerja Eselon I, 6 Satuan Kerja Eselon II Sekretariat Jenderal (laporan dan sertifikat terlampir). Seluruh peserta Bimtek dan TOT tersebut telah menjadi bagian integral dalam memberikan pemahaman seluruh SDM di Satker masing-masing terkait pelaksanaan PUG di Kemlu.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L memiliki SDM terlatih PUG?

SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG

- 1) Jumlah SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG
- 2) Sebutkan rincian jumlah SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG di masing-masing UKE I
- 3) Persentase UKE I memiliki SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, Data tersedia. Lampirkan!

☐ Tidak

Catatan:

Nilai= 100%

Seluruh SDM Kementerian Luar Negeri (Pusat dan Perwakilan RI), termasuk SDM Pemantau telah terlatih subtransi terkait konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan, penganggaran responsif gender, dan parameter kesetaraan gender.

Berikut rincian Data SDM Pemantau terlatih PUG Kemlu Tahun 2022:

- 1) Jumlah SDM Pemantau = 71 orang (32 laki-laki dan 39 perempuan)
- 2) Rincian jumlah SDM Pemantau di masing-masing UKE I (data terlampir)
- 3) Persentase UKE I yang memiliki SDM Pemantau = 80% (8 dari 10 UKE I).

Di tahun 2022, Kemlu telah melaksanakan Bimtek PUG untuk seluruh Satker Pusat dan Perwakilan RI dan secara khusus telah melaksanakan pelatihan Training of Trainers untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) secara luring di Pusdiklat Kemlu pada tanggal 29-20 Juni dan 1 Juli 2022. Kegiatan diikuti oleh 20 Pejabat dari 8 Satuan Kerja Eselon I, 6 Satuan Kerja Eselon II Sekretariat Jenderal (laporan dan sertifikat terlampir). Seluruh peserta Bimtek dan TOT tersebut telah menjadi bagian integral dalam memberikan pemahaman seluruh SDM di Satker masing-masing terkait pelaksanaan PUG di Kemlu.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L memiliki SDM terlatih PUG?

SDM APIP terlatih PUG

- 1) Persentase SDM APIP terlatih PUG

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, Data tersedia. Lampirkan!

☐ Tidak

Catatan:

Nilai= 100%

Seluruh SDM APIP Kementerian Luar Negeri telah terlatih substansi terkait konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan, penganggaran responsif gender, dan parameter kesetaraan gender.

Di tahun 2022, terdapat sebanyak 131 SDM APIP Kementerian Luar Negeri (56 laki-laki dan 75 perempuan).

Di tahun 2022, Kemlu telah melaksanakan Bimtek PUG untuk seluruh Satker Pusat dan Perwakilan RI, melaksanakan Bimtek PPRG khusus untuk auditor, dan telah melaksanakan pelatihan Training of Trainers untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) secara luring di Pusdiklat Kemlu pada tanggal 29-30 Juni dan 1 Juli 2022 yang diikuti oleh 20 Pejabat dari 8 Satuan Kerja Eselon I, 6 Satuan Kerja Eselon II Sekretariat Jenderal (laporan terlampir). Seluruh peserta Bimtek dan TOT tersebut telah menjadi bagian integral dalam memberikan pemahaman seluruh SDM di Satker masing-masing terkait pelaksanaan PUG di Kemlu.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L memiliki SDM terlatih PUG?

SDM bidang Hukum terlatih PUG

1) Persentase SDM bidang Hukum terlatih PUG

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, Data tersedia. Lampirkan!

☐ Tidak

Catatan:

Nilai=100%

Seluruh SDM Kementerian Luar Negeri (Pusat dan Perwakilan RI), termasuk SDM bidang Hukum telah terlatih substansi terkait konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan, penganggaran responsif gender, dan parameter kesetaraan gender.

Di tahun 2022, terdapat 74 orang SDM bidang Hukum yang tersebar di berbagai Satker di Kementerian Luar Negeri.

Di tahun 2022, Kemlu telah melaksanakan Bimtek PUG untuk seluruh Satker Pusat dan Perwakilan RI dan secara khusus telah melaksanakan pelatihan Training of Trainers untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) secara luring di Pusdiklat Kemlu pada tanggal 29-30 Juni dan 1 Juli 2022. Kegiatan diikuti oleh 20 Pejabat dari 8 Satuan Kerja Eselon I, 6 Satuan Kerja Eselon II Sekretariat Jenderal (laporan dan sertifikat terlampir). Seluruh peserta Bimtek dan TOT tersebut telah menjadi bagian integral dalam memberikan pemahaman seluruh SDM di Satker masing-masing terkait pelaksanaan PUG di Kemlu.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L memiliki Gender Champions?

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, lampirkan SK

☐ Tidak

Catatan:

Ya, Kementerian Luar Negeri memiliki Gender Champions yang terdiri dari seluruh unsur Kelompok Kerja (Pokja) PUG pada tingkat K/L, dimana Staf Ahli Menlu Bidang Manajemen bertugas sebagai koordinator, juga pokja PUG tingkat UKE I, Perwakilan RI di Luar Negeri, dan Tim Pelaporan PUG yang menjadi motor penggerak PUG di Lembaga dan Satuan Kerja masing-masing. Para anggota Pokja merupakan staf terpilih berdasarkan kompetensi dan komitmen dalam memajukan PUG di lingkup Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Pada tahun 2022 Gender Champions Kemlu telah ditambah dengan para anggota Tim Penerima Pengaduan terkait Tindak Pelecehan Seksual di masing-masing satker UKE I.

Selain itu, Kemlu telah membentuk Tim Kemlu Sisterhood yang juga menjadi motor penggerak PUG di Kementerian Luar Negeri.

Secara khusus, Menteri Luar Negeri menjadi Gender Champion utama Kementerian Luar Negeri. Peran Menlu sebagai gender champion juga diakui antara lain dalam forum internasional, melalui peran aktif dalam G20 Ministerial Conference, menginisiasi penyelenggaraan Southeast Asia Dialogue of Women Leaders dan International Conference on Afghan Women's Education.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L memiliki Focal Point PUG?

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, lampirkan SK

☐ Tidak

Catatan:

Ya, Kementerian Luar Negeri memiliki Focal Points yang terdiri dari seluruh unsur Kelompok Kerja (Pokja) PUG pada tingkat Lembaga, UKE I, Perwakilan RI di Luar Negeri, dan Tim Pelaporan PUG yang menjadi motor penggerak PUG di Lembaga dan Satuan Kerja masing-masing. Para anggota Pokja merupakan staf terpilih berdasarkan kompetensi dan komitmen dalam memajukan PUG di lingkup Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah KL memiliki Fasilitator PUG?

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, Bersertifikat dan lampirkan SK

☐ Tidak

Catatan:

Kementerian Luar Negeri memiliki Fasilitator PUG yang terlatih baik dari eksternal (KPPPA) maupun internal melalui Bimtek PPRG di seluruh Satker dan Perwakilan.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L memiliki Kelompok Kerja (Pokja) PUG?

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- Ya, dengan landasan hukum berupa (Lampirkan)
- ☒ 1) Surat Keputusan Menteri/Kepala Lembaga
- ☐ 2) Bentuk lainnya
- ☐ Tidak

Catatan:

Kementerian Luar Negeri memiliki Pokja PUG pada seluruh Satker Pusat dan sebagian besar Perwakilan yang dituangkan dalam Surat Keputusan terlampir contoh SK Pokja PUG Untuk Satker Pusat dan Perwakilan.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Jika KL memiliki Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Apakah Pokja PUG beranggotakan seluruh UKE I terkait?

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☒ Ya
- ☐ Tidak

Catatan:

Ya, Kementerian Luar Negeri memiliki Pokja PUG pada yang beranggotakan unsur seluruh UKE I yang dituangkan dalam Surat Keputusan Eselon I. Terlampir beberapa SK Pokja PUG Kementerian Luar Negeri.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Jika KL memiliki Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Apakah Pokja PUG beranggotakan seluruh UKE II terkait?

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☒ Ya
- ☐ Tidak

Catatan:

Kementerian Luar Negeri memiliki Pokja PUG yang beranggotakan seluruh unit Eselon II yang tertuang pada SK Pokja PUG Eselon I. terlampir contoh SK Pokja PUG Untuk Satker Pusat dan Perwakilan.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah Pokja PUG menyusun Rencana Aksi Pokja tentang Penyelenggaraan PUG 5 (lima) Tahunan?

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- Ya (Lampirkan)
- ☒ 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I
- ☐ 2) Bentuk lainnya
- ☐ Tidak

Catatan:

Pokja PUG setiap tahunnya membuat Renaksi Pokja (jangka pendek) di awal tahun sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun kedepan. Selain itu Pokja juga telah menginventarisir garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka panjang. Renaksi ini dituangkan dalam laporan hasil Forum Komunikasi yang rutin dilaksanakan paling tidak sebanyak 2x setiap tahunnya.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah Pokja PUG menyusun Rencana Aksi Pokja tentang Penyelenggaraan PUG Tahunan?

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- Ya (Lampirkan)
- ☒ 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I
- ☐ 2) Bentuk lainnya
- ☐ Tidak

Catatan:

Pokja PUG setiap tahunnya membuat Renaksi Pokja (jangka pendek) di awal tahun sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun kedepan. selain itu Pokja juga telah menginventarisir garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan tiap tahun, termasuk di Perwakilan RI di Luar Negeri.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah Rencana Aksi Pokja K/L 5 (lima) tahunan tentang Penyelenggaraan PUG memuat 3 (tiga) prasyarat Pelembagaan PUG? (Lampirkan)

Nilai Maksimal: 1.50

Nilai: 1.50

Jawaban:

- Ya
- ☒ 1) Kebijakan
- ☒ 2) SDM dan Internalisasi PUG
- ☒ 3) Data Terpilah
- ☐ Tidak

Catatan:

Ya, Renaksi Pokja 5 Tahunan yang tertuang dalam Permenlu 21/2020 di lingkungan Kemlu telah memuat 3 prasyarat pelembagaan PUG yang juga diturunkan ke dalam Renaksi dan SK Pokja PUG tahunan

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah Rencana Aksi Pokja K/L 5 (lima) tahunan tentang Penyelenggaraan PUG, memuat 7 (tujuh) proses Penyelenggaraan PUG? (Lampirkan)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

Ya

- ☒ 1) Perencanaan
- ☒ 2) Penganggaran
- ☒ 3) Pelaksanaan
- ☒ 4) Pemantauan
- ☒ 5) Evaluasi
- ☒ 6) Pengawasan
- ☒ 7) Pelaporan

☐ Tidak

Catatan:

Ya, Rencana Aksi Pokja Jangka Panjang Kementerian Luar Negeri yang tertuang dalam Permenlu 21/2020 khususnya Bab III-Bab V telah menginventarisir garis besar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang yang didalamnya telah memuat 7 proses penyelenggaraan PUG, keseluruhan proses ini diturunkan dalam renaksi dan SK Tahunan Pokja PUG Kementerian Luar Negeri.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah Rencana Aksi Pokja K/L tahunan tentang Penyelenggaraan PUG, memuat 3 (tiga) prasyarat Pelembagaan PUG? (Lampirkan)

Nilai Maksimal: 1.50

Nilai: 1.50

Jawaban:

Ya

- ☒ 1) Kebijakan
- ☒ 2) SDM dan Internalisasi PUG
- ☒ 3) Data Terpilah

☐ Tidak

Catatan:

Ya, Rencana Aksi Pokja Kementerian Luar Negeri telah memuat 3 prasyarat pelembagaan PUG yang dituangkan dalam SK Tahunan Pokja PUG Kementerian Luar Negeri.

Pokja PUG membuat Renaksi Pokja di awal tahun sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun kedepan, selain itu Pokja juga telah menginventarisir garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka panjang yang dituangkan dalam Permenlu 21/2020 BAB III-BAB V.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah Rencana Aksi Pokja K/L tahunan tentang Penyelenggaraan PUG, memuat Tujuh (7) proses penyelenggaraan PUG? (Lampirkan)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

Ya

- ☒ 1) Perencanaan
- ☒ 2) Penganggaran
- ☒ 3) Pelaksanaan
- ☒ 4) Pemantauan
- ☒ 5) Evaluasi
- ☒ 6) Pengawasan
- ☒ 7) Pelaporan

☐ Tidak

Catatan:

Ya, Rencana Aksi Pokja Kementerian Luar Negeri telah memuat 7 proses penyelenggaraan PUG yang dituangkan dalam SK Tahunan Pokja PUG Kementerian Luar Negeri.

Pokja PUG membuat Renaksi Pokja di awal tahun sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun kedepan, selain itu Pokja juga telah menginventarisir garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka panjang yang dituangkan dalam Permenlu 21/2020 Pasal 8-15

Renaksi ini turut dituangkan dalam laporan PUG.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Perempuan yang menduduki jabatan Eselon

Persentase perempuan yang menjabat setara Eselon I

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 0.40

Jawaban:

- ☒ Data tersedia
- ☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai=8%

Di tahun 2022, terdapat 1 pejabat Perempuan yang menduduki jabatan setara Eselon I di Kementerian Luar Negeri.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Perempuan yang menduduki jabatan Eselon

Persentase perempuan yang menjabat setara Eselon II

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 1.47

Jawaban:

- ☒ Data tersedia
- ☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai= 49%

Di tahun 2022, terdapat 27 pejabat Perempuan yang menduduki jabatan setara Eselon II dari 55 pegawai di Kementerian Luar Negeri.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Perempuan yang menduduki jabatan Eselon

Persentase perempuan yang menjabat setara Eselon III

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 1.30

Jawaban:

☒ Data tersedia

☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai= 65%

Di tahun 2022, terdapat 60 pegawai perempuan menduduki jabatan struktural Eselon III dari 92 jabatan Eselon III yang terisi di Kementerian Luar Negeri.

2. SDM dan Internalisasi PUG

Apakah K/L melakukan internalisasi PUG di lingkup Internal?

Nilai Maksimal: 9.00

Nilai: 9.00

Jawaban:

Ya, dalam bentuk apa? dan lampirkan!

☒ 1) Sosialisasi (Lampirkan laporan kegiatan)

☒ 2) Pelatihan (Lampirkan laporan kegiatan)

☒ 3). Lainnya (Lampirkan laporan kegiatan)

☐ Tidak

Catatan:

Sepanjang tahun 2022, Kementerian Luar Negeri telah mengintegrasikan kebijakan pengarusutamaan gender ke dalam berbagai kegiatan dan program di Pusat dan Perwakilan dalam rangka memperkuat internalisasi PUG di lingkup internal Kementerian Luar Negeri.

Beberapa program yang menjadi highlight pelaksanaan internalisasi PUG di Kementerian Luar Negeri di antaranya:

1. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis PUG dan PPRG bagi pegawai pusat, anggota kelompok kerja maupun bagi pegawai di seluruh Perwakilan RI;
2. Talk Show dan Webinar yang bertajuk pemberdayaan perempuan, peran perempuan dalam diplomasi, dan peringatan International Women's Day di Pusat dan Perwakilan RI;
3. Pelaksanaan survey komitmen PUG yang mencapai 100%.
4. Pelaksanaan berbagai sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pegawai pusat, anggota kelompok kerja maupun bagi pegawai di seluruh Perwakilan Republik Indonesia, i.e. Training of Trainers PUG;
5. Penguatan Sarana dan Prasarana layanan keluarga Kemlu, i.e. daycare, ruang laktasi, dll;
6. Pelaksanaan politik luar negeri yang merefleksikan komitmen PUG, i.e. menjadi Pionir PUG dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, penyelenggaraan ASEAN-US Ministerial Dialogue on Gender Equality and Women's Empowerment (September 2022) dan International Conference on Afghan Women's Education (Desember 2022);
7. Pengintegrasian PUG dalam perlindungan WNI di luar negeri, khususnya dalam penanganan kelompok rentan seperti seperti ibu dan anak.

3. Data Terpilah

Apakah K/L memiliki sistem data terpilah?

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya. Sebutkan nama sistem aplikasi pencatatan/data terpilah menurut jenis kelamin!

☒ 3 sistem aplikasi atau lebih

☐ 2 sistem aplikasi

☐ 1 sistem aplikasi

☐ Tidak

Catatan:

Kementerian Luar Negeri memiliki aplikasi data terpilah, antara lain:

1. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SIM SDM) yang memiliki pencatatan/data terpilah menurut jenis kelamin.
2. Sistem Data digital Peduli WNI yang bisa diakses langsung secara online, dengan link: peduliwni.kemlu.go.id.
3. Lainnya; yaitu data kepegawaian yang dimiliki oleh Bagian Administrasi Perwakilan RI, SIM Non-ASN Kementerian Luar Negeri, data survey Indeks Citra, data pengusaha dan investor yang dikelola Fungsi Ekonomi pada Perwakilan RI, data mahasiswa Indonesia yang dikelola oleh Fungsi Protikons dan Pensosbud pada Perwakilan RI.

3. Data Terpilah

Sebutkan publikasi rutin data sektor dengan menggunakan data terpilah yang diterbitkan K/L (dapat dalam bentuk profil gender sektoral)!

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya (sebutkan dan Lampirkan)

☒ 3 data atau lebih

☐ 2 data

☐ 1 data

☐ Tidak

Catatan:

- 1) Publikasi statistik pegawai Kemlu pada platform media sosial Kementerian Luar Negeri, contoh pada lampiran screenshot publikasi data pilah pegawai pada peringatan Hari Kartini tahun 2022
- 2) Publikasi sebaran WNI di berbagai kawasan dan negara
- 3) Data pilah pegawai seluruh Kemlu dan Satker Eselon II

3. Data Terpilah

Persentase UKE I (teknis) yang memiliki Data Terpilah sektoral (di luar statistik dasar yang dipublikasikan BPS). Lampirkan.

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

☒ Data tersedia

☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai=100%

Seluruh UKE I Kementerian Luar Negeri memiliki data terpilah sektoral terkait kepegawaian. Berikut beberapa contoh: data pilah SDM Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler tahun 2022, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika tahun 2022, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa tahun 2022, dan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN).

PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN

Nilai Maksimal: 745.00

2. Perencanaan

1. Regulasi/Kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam Perencanaan
Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis yang mengatur tentang PUG dalam Perencanaan?

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

- Ya, dalam bentuk apa? dan lampirkan!
- ☒ 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I
- ☐ 2) Pedoman/Petunjuk Teknis
- ☐ 3) Lainnya
- ☐ Tidak

Catatan:

Kemlu telah memiliki regulasi teknis yang mengatur PUG dalam perencanaan. Kebijakan ini berupa panduan teknis tentang mekanisme perencanaan PUG yang dituangkan dalam bentuk pedoman/petunjuk teknis, yaitu:

1. Peraturan Menlu No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kemlu; dan
2. Keputusan Menlu No. 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kemlu dan Perwakilan RI.

Di level teknis atau UKE I, terdapat Keputusan UKE I yang menetapkan pembentukan Pokja PUG dan tugas Pokja yang di antaranya adalah mengimplementasikan dan mengoordinasikan perencanaan PUG di masing-masing UKE I.

2. Perencanaan Responsif Gender (Lima Tahunan dan Tahunan)
Apakah K/L telah melakukan analisis gender dalam menyusun Dokumen Perencanaan lima tahunan dan tahunan?

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

- Ya (Lampirkan bukti dokumennya)
- ☒ 1) Dokumen perencanaan lima tahunan
- ☒ 2) Dokumen perencanaan tahunan
- ☐ Tidak

Catatan:

1. Perencanaan Responsif Gender Lima Tahunan telah tercantum dalam Renstra Kemenlu tahun 2020 - 2024, khususnya dalam bahasan terkait Arah kebijakan peningkatan infrastruktur diplomasi berbasis teknologi informasi (Halaman 83 - 106)
2. Perencanaan Responsif Gender Tahunan telah tercantum dalam Rencana Aksi Tahunan Pokja Kemenlu tahun 2022.

2. Sebutkan isu gender yang teridentifikasi dari hasil analisis gender (Lampirkan bukti analisisnya)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

- Ya
- ☒ 1) Bidang Politik
- ☒ 2) Bidang Hukum
- ☒ 3) Bidang Sosial
- ☒ 4) Bidang Ekonomi
- ☒ 5) Bidang Lainnya
- ☐ Tidak

Catatan:

- 1) Bidang Politik Keamanan: Isu women, peace and security, akan tetap menjadi perhatian politik luar negeri Indonesia. Indonesia juga akan terus mendorong dan mempromosikan peran perempuan dalam perdamaian melalui implementasi ASEAN Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security, UN Resolution 1325: Women, Peace and Security, dan komitmen ASEAN-IPR terhadap pengarusutamaan gender (Halaman 63)
- 2) Bidang Hukum: Penyelenggaraan pelayanan publik berupa pencatatan dan penerbitan dokumen sipil bagi WNI di luar negeri, khususnya pencatatan dan penerbitan akta pernikahan dan kelahiran adalah upaya vital dalam rangka perlindungan hak sipil perempuan dan anak. Banyak negara sahabat yang tidak mengizinkan atau melayani pencatatan pernikahan dan kelahiran bagi PMI di luar negeri, yang mengakibatkan kerentanan bagi perempuan sebagai istri dan anak-anak hasil pernikahan tersebut. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Luar Negeri telah membangun aplikasi Portal Peduli WNI yang memfasilitasi layanan penerbitan akta kelahiran dan Nomor Induk Terpadu (NIT) pengganti Nomor Induk Kependudukan bagi anak-anak PMI di luar negeri. Hingga 18 Juni 2020, Portal Peduli WNI telah menerbitkan sebanyak 25 akta kelahiran dan 1 NIT. Kedepannya, melalui kerja sama dengan Kementerian Agama, Portal Peduli WNI juga akan memfasilitasi layanan pencatatan pernikahan bagi WNI muslim di luar negeri. (Halaman 65)
- 3) Bidang sosial: Dalam rangka memastikan perlindungan WNI di luar negeri yang inklusif, Kementerian Luar Negeri terus melaksanakan diplomasi, kerja sama, dan fasilitasi a) penyelenggaraan pendidikan dasar bagi anak-anak PMI di luar negeri, b) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan serta peningkatan keterampilan PMI di Perwakilan RI di luar negeri, c) penyusunan pedoman manajemen shelter (tempat singgah sementara/TSS) dan pelayanan publik yang sensitif gender dan pengawasan implementasinya, serta peningkatan kapasitas pejabat fungsional diplomat terkait isu-isu gender.
- 4) Bidang Ekonomi: Peningkatan keterlibatan pelaku usaha perempuan dilakukan melalui berbagai forum bisnis maupun organisasi/forum internasional, diantaranya:
- a. Kementerian Luar Negeri secara reguler menyelenggarakan "Indonesia-Latin America and the Caribbean (INALAC) Business Forum" setiap tahunnya. Berbagai hal lain yang dicapai melalui kegiatan ini adalah pengarusutamaan gender dan penguatan ekonomi pengusaha, termasuk pengusaha perempuan dengan memperluas jaringan antara organisasi perempuan yang terkait dengan perdagangan internasional.
- b. Di IORA, Indonesia merupakan salah satu negara pendorong (leading countries) pada area kerja sama prioritas Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan akan terus memperkuat kerja sama di bidang ini, termasuk melalui berbagai inisiatif pada Working Group on Women's Economic Empowerment (WGBEE) yang baru dibentuk.
- c. Sebagai anggota ekonomi APEC, Indonesia berpartisipasi aktif pada Policy Partnership on Women and the Economy (PPWE), yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi dan partisipasi perempuan dalam perekonomian dan mengkoordinasikan kegiatan gender di APEC
- 5) Pelindungan WNI: Dalam konteks perlindungan WNI di luar negeri, upaya pemberdayaan gender akan terus diarusutamakan khususnya bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) perempuan dan anak-anak dari PMI yang masuk dalam kategori rentan.

2. Perencanaan Responsif Gender (Lima Tahunan dan Tahunan)

Alat analisis gender yang digunakan: (Lampirkan)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

Ada

- ☒ Gender Analysis Pathway (GAP)
☒ Problem Based Approach (PROBA)
☐ Model Harvard
☐ Model Moser
☒ Model SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat)
☒ Lainnya

☐ Tidak ada

Catatan:

Perencanaan Responsif Gender yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri dilakukan melalui analisis permasalahan yang ada / problem based approach. Contoh ini dapat dilihat pada kegiatan perlindungan WNI, dan juga dalam keorganisasian sebagaimana dituangkan ke dalam poin arah kebijakan Kemenlu Nomor 10.

GAP dilaksanakan sebagai alat analisis dalam proses perencanaan di tingkat Eselon II.

2. Perencanaan Responsif Gender (Lima Tahunan dan Tahunan)

Apakah substansi gender terintegrasi ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) K/L dan Renstra UKE I? (masing-masing UKE I juga mengisi)

Nilai Maksimal: 25.00

Nilai: 25.00

Jawaban:

Ya. Jika Ya, apakah hasil analisis gender tertuang dalam:

- ☒ 1) Visi (Lampirkan)
☒ 2) Misi (Lampirkan)
☒ 3) Tujuan (Lampirkan)
☒ 4) Sasaran (Lampirkan)
☒ 5) Arah Kebijakan dan Strategi (Lampirkan)
☒ 6) Sasaran Program (Lampirkan)
☒ 7) Sasaran Kegiatan (Lampirkan)
☒ 8) Indikator Kinerja (Lampirkan)
☒ 9) Target Kinerja (Lampirkan)
☒ 10) Kerangka Pendanaan (Lampirkan)

☐ Tidak

Catatan:

1. Substansi gender terintegrasi ke dalam RENSTRA Kementerian Luar Negeri dan RENSTRA UKE I, yang tertuang dalam Renstra Kemenlu TA 2020-2024 dan juga dalam PK dan Renaksi Menlu TA 2022.

2. Bukti dukung substansi gender yang tertuang dalam RENSTRA UKE I, sbb:

- Renstra Sekretariat Jenderal TA 2020 - 2024 (Halaman 7)
- Renstra Ditjen Aspasaf TA 2020 - 2024 (Halaman 46)
- Renstra Ditjen HPI (Halaman 37)
- Renstra Ditjen KS ASEAN (Halaman 20)
- Renstra BSKLN (Halaman 18)

2. Perencanaan Responsif Gender (Lima Tahunan dan Tahunan)

Persentase UKE I yang sudah mengintegrasikan substansi gender ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) UKE I? (lampirkan bukti)

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

- ☒ Data tersedia
☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai=100%

Seluruh UKE I sudah mengintegrasikan substansi gender ke dalam Renstra masing-masing.

2. Perencanaan Responsif Gender (Lima Tahunan dan Tahunan)

Apakah substansi gender terintegrasi ke dalam Renja K/L (UKE II)?

Nilai Maksimal: 15.00

Nilai: 15.00

Jawaban:

Ya. Jika Ya, apakah hasil analisis gender tertuang dalam:

- ☒ 1) Kegiatan
☒ 2) Sasaran Kegiatan
☒ 3) Indikator Kinerja Kegiatan
☒ 4) Klasifikasi Rincian Output (KRO)
☒ 5) Rincian Output (RO)

☐ Tidak

Catatan:

Substansi gender sudah terintegrasi ke dalam Renstra (lima tahunan) dan Renja K/L (UKE II) dalam RO.

2. Perencanaan Responsif Gender (Lima Tahunan dan Tahunan)

Persentase UKE-II yang sudah mengintegrasikan substansi gender ke dalam Renja K/L? (lampirkan bukti)

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

- ☒ Data tersedia
☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai=100%

Seluruh UKE II telah mengintegrasikan substansi gender ke Renja masing-masing

3. Penganggaran

1. Regulasi/Kebijakan Teknis yang mengatur PUG dalam Penganggaran

Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam Penganggaran?

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya, dalam bentuk apa? (Lampirkan)

- ☒ 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I
☐ 2) Pedoman/Petunjuk Teknis
☐ 3) Lainnya
☐ Tidak

Catatan:

Kemlu telah memiliki regulasi teknis yang mengatur PUG dalam penganggaran. Kebijakan ini berupa panduan teknis tentang mekanisme penganggaran PUG yang dituangkan dalam bentuk pedoman/petunjuk teknis, yaitu:

1. Peraturan Menlu No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kemlu; dan
2. Keputusan Menlu No. 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kemlu dan Perwakilan RI.

Di level teknis atau UKE I, terdapat Keputusan UKE I yang menetapkan pembentukan Pokja PUG dan tugas Pokja yang di antaranya adalah melakukan penganggaran responsif gender di masing-masing UKE I.

2. Anggaran Responsif Gender

Apakah K/L melakukan tagging ARG pada Rincian Output (RO) RENJA?

Sebutkan Rincian Output yang telah di tagging ARG pada RENJA UKE-II, menurut program.

UKE-II (setiap UKE II agar mengisi)

Uraikan pada MATRIKS!

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 25.00

Nilai: 25.00

Jawaban:

- ☒ Ya, Data tersedia
☐ Tidak. Data tidak tersedia

Catatan:

tagging ARG pada RO di aplikasi Renja KRISNA Bappenas sudah dilakukan

2. Anggaran Responsif Gender

Persentase RO yang di-tagging ARG?

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi dan tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 1.30

Jawaban:

- ☒ Data tersedia
☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai = 26%

Kementerian Luar Negeri telah menerapkan Anggaran Responsif Gender dan tagging RO, namun masih memiliki kendala sistem karena semua Perwakilan RI belum memiliki akses ke menu tagging RO ARG pada aplikasi Krisna

2. Anggaran Responsif Gender

Jumlah RO yang di-tagging ARG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya?

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

- ☒ Ya, Buktikan
☐ Tidak

Catatan:

Ya, jumlah RO yang mendapatkan tagging ARG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2021: 32

2022: 35

2. Anggaran Responsif Gender

Persentase UKE-II yang melakukan tagging ARG?

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 2.35

Jawaban:

- ☒ Data tersedia
☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai= 47%

Meskipun belum seluruh UKE II melakukan tagging, namun program PUG dilaksanakan dengan mata anggaran yang tersedia.

2. Anggaran Responsif Gender

Jumlah UKE-II yang melakukan tagging ARG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya?

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

- ☒ Ya, Buktikan
☐ Tidak

Catatan:

Ya, jumlah UKE II yang melakukan tagging ARG pada Renja KRISNA mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2. Anggaran Responsif Gender

Persentase nilai ARG K/L dibandingkan Total Anggaran K/L?

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 0.20

Jawaban:

- ☒ Data tersedia
☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Nilai= 2%

Kementerian Luar Negeri secara prinsip telah menerapkan ARG dan tagging RO.

Meskipun persentase nilai ARG kecil dibandingkan dengan total anggaran, namun berbagai kegiatan PUG tetap terlaksana dengan dukungan anggaran yang cukup meningkat.

Rendahnya persentase nilai ARG terhadap total anggaran juga disebabkan karena masih adanya kendala sistem untuk tagging RO di Perwakilan RI di Luar Negeri.

2. Anggaran Responsif Gender

Jumlah nilai ARG K/L mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya?

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

- ☒ Ya, Buktikan
☐ Tidak

Catatan:

Tagging mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2021: Rp134.711.320.000

2022: Rp139.711.438.000

Saat ini juga sudah terdapat anggaran yang dialokasikan oleh Perwakilan RI terkait dengan kegiatan PUG, namun belum bisa dilakukan tagging anggaran karena adanya keterbatasan pelaksanaan tagging pada aplikasi KRISNA masing-masing Perwakilan RI, sehingga RO milik Perwakilan RI yang berisikan kegiatan yang terkait dengan PUG belum dapat muncul pada data rekapitulasi yang ditarik dari aplikasi Renja KRISNA.

4. Pelaksanaan

1. Prioritas K/L yang Responsif Gender

Apa prioritas K/L yang terkait dengan program Prioritas Nasional? Sebutkan!

Nilai Maksimal: 0.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☒ Ada. Sebutkan!
☐ Tidak ada

Catatan:

Kemenlu memiliki empat program Prioritas Nasional yang memiliki keterkaitan dengan pengarusutamaan gender:

1. Penguatan Diplomasi Ekonomi
2. Perlindungan WNI
3. Diplomasi kedaulatan dan kebangsaan
4. Meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia

1. Prioritas K/L yang Responsif Gender

Apakah prioritas K/L tersebut telah mengintegrasikan substansi gender?

Nilai Maksimal: 20.00

Nilai: 20.00

Jawaban:

- ☒ Ya
☐ Tidak

Catatan:

Ya. Salah satunya dalam prioritas keempat, yaitu meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, dimana isu women, peace and security, tetap menjadi perhatian politik luar negeri Indonesia. Dalam kaitan ini, isu women empowerment and democracy akan menjadi topik bahasan dalam Bali Democracy Forum serta International Conference on Afghan Women, yang telah diselenggarakan Desember 2022.

Selain itu, upaya untuk membentuk Network Asia Tenggara bagi negosiator dan mediator perempuan akan terus dijalankan dan mengkaitkannya dengan networking di bagian dunia lainnya.

2. Apa output dari masing-masing K/L dalam mendukung: (1) penurunan kesenjangan gender; (2) pemberdayaan perempuan (bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dll); (3) perlindungan hak perempuan (pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan); dan (4) peningkatan kualitas keluarga? (amanat CEDAW, SDGs, peraturan perundang-undangan terkait, dll)

Uraikan Output pada MATRIKS dan lampirkan!

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 180.00

Nilai: 180.00

Jawaban:

Ada

- ☒ Mendukung Penurunan Kesenjangan Gender
- ☒ Mendukung Pemberdayaan Perempuan
- ☒ Mendukung Perlindungan Hak Perempuan
- ☒ Mendukung Peningkatan Kualitas Keluarga

☐ Tidak ada

Catatan:

MENDUKUNG PENURUNAN KESENJANGAN GENDER:

1. Peningkatan kapasitas dan awareness secara reguler melalui berbagai kegiatan, a.l.

- Penyelenggaraan ASEAN-US Ministerial Dialogue on Gender Equality and Women's Empowerment (September 2022), yang juga mengadopsi Joint Statement of the ASEAN – U.S. Ministerial Dialogue on Gender Equality and Women's Empowerment;
- Penyelenggaraan International Conference on Afghan Women's Education (December 2022), menghasilkan The Bali Message of the International Conference on Afghan Women's Education;
- Dihasilkannya beberapa kajian termasuk Penyusunan Kajian Isu Pasangan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);

2. Dukungan di tataran global:

Kemlu aktif dalam mendorong isu kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan hak-hak perempuan. Topik-topik ini merupakan cross-cutting issue yang kerap muncul dalam berbagai agenda global, khususnya perlindungan hak-hak kelompok rentan, penanggulangan bencana dan perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan serta peacebuilding.

Kemlu mewakili Indonesia terlibat dalam kampanye UN Women menginisiasi dua kampanye global terkait isu gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu "HeForShe" (dimana Presiden Joko Widodo menjadi salah satu Impact Champion) dan "Generation Equality". Kampanye HeForShe bertujuan untuk meningkatkan kontribusi kaum pria dalam mendorong kesetaraan gender, sementara Generation Equality menuntut persamaan hak antara kaum perempuan dan laki-laki dalam hal upah kerja, pembagian beban pekerjaan rumah tangga, penghapusan pelecehan seksual dan segala bentuk kekerasan (termasuk terhadap anak perempuan), layanan kesehatan sesuai kebutuhan, partisipasi dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan.

Kemlu mewakili Indonesia juga memiliki komitmen tinggi dalam upaya pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, antara lain dengan menjadi negara pihak berbagai instrumen pokok HAM internasional, khususnya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), dan implementasi Deklarasi Beijing dan Platform for Action tahun 1995 serta hasil-hasil Sesi khusus ke-23 SMU PBB tahun 2000.

3. Aktif terlibat dalam mendukung hak-hak perempuan Afghanistan untuk memperoleh pendidikan. Upaya dilakukan melalui tataran bilateral, koordinasi internal, dan multilateral, melibatkan pemangku kepentingan seperti tokoh, aktivis, dan akademisi perempuan. International Conference on Afghan Women's Education diselenggarakan oleh Indonesia bersama dengan Qatar pada 8 Desember 2022, menghasilkan The Bali Message of the International Conference on Afghan Women's Education.

MENDUKUNG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN:

1. Seleksi JPT dan pengangkatan pejabat Eselon III secara transparan, merit-based, dan non-diskriminatif (data pada matriks terlampir)
2. Pemberdayaan pengusaha perempuan, a.l. melalui penyelenggaraan "Indonesia-Latin America and the Caribbean (INALAC) Business Forum" setiap tahunnya.
3. Pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan dalam menciptakan perdamaian dan keamanan

Kemlu mewakili Indonesia menaruh perhatian besar pada agenda DK PBB "Women, Peace and Security" (resolusi DK PBB 1325), didasari komitmen untuk memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan dalam menciptakan perdamaian dan keamanan, meningkatkan perhatiannya terhadap pencegahan konflik, promosi budaya damai, toleransi dan pengakuan peran perempuan dalam keluarga untuk mencegah radikalisasi, memastikan nol toleransi pelecehan seksual dalam situasi konflik, dan meningkatkan kontribusi negara anggota untuk peacekeeping operations, khususnya mempromosikan dan meningkatkan peran perempuan dalam proses perdamaian dan misi PKO.

MENDUKUNG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN:

1. Penjaminan hak untuk menyusui selama waktu kerja
2. Memerangi kekerasan seksual di tataran nasional dan global

* Kemlu mewakili Indonesia telah bergabung dalam Preventing Sexual Violence Initiative (PSVI), suatu koalisi global inisiatif dari Pemerintah Inggris untuk memerangi kekerasan seksual dalam konflik melalui upaya advokasi dan program aksi di tingkat nasional, regional dan global.

*Kemlu juga mewakili Indonesia berpartisipasi aktif pada Global Summit to End Sexual Violence in Conflict di London. Inggris telah kembali meluncurkan inisiatif penyusunan Murad Code, yang dimaksudkan akan menjadi global code of conduct dalam penanganan kekerasan seksual terkait konflik, yang aman, survivor-centric, beretika dan efektif.

* Kemlu mewakili Indonesia bersama Filipina sejak 1993 menginisiasi dan memfasilitasi resolusi dua tahunan "Violence against Women Migrant Workers". Diadopsinya resolusi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengangkat kepentingan nasional Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja migran, dalam memperkuat upaya perlindungan pekerja migran khususnya pekerja migran perempuan.

* Upaya Kemlu mewakili Indonesia di bidang kesetaraan gender juga diarahkan untuk mendukung upaya mendorong dan memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang responsif gender di seluruh bidang pembangunan prioritas, pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan; serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Di tingkat internal organisasi, sejumlah upaya dilakukan untuk mendukung perlindungan hak perempuan, termasuk penjaminan hak untuk menyusui selama waktu kerja, penyediaan ruang laktasi, serta fasilitas daycare.

Di samping itu, dalam rangka pencegahan kasus KDRT, Perwakilan RI juga telah menyelenggarakan a.l. kegiatan:

* KJRI Sydney bekerja sama dengan CUKUP! Foundation menyelenggarakan Pelatihan Hak Asasi Perempuan di Australia bagi Penduduk Migran dalam Kaitannya dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pelatihan tersebut dilakukan secara hybrid/langsung oleh perwakilan komunitas Indonesia di South Australia dan secara virtual, serta disebarluaskan melalui live youtube KJRI Sydney (a.l. https://www.youtube.com/watch?v=tD_PScoUvM).

* BERSAMA KiTA Salling JAGA, adalah jargon pelayanan perlindungan Warga Negara Indonesia di wilayah kerja KJRI Sydney, yang telah diluncurkan pada Juni 2020. Penguatan kerja sama dengan diaspora dalam rangka melawan KDRT terus dilakukan termasuk melalui penyelenggaraan diskusi dan penyuluhan umum.

MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA:

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas keluarga, sejumlah kebijakan/program yang dilakukan termasuk:

1. Penerapan kebijakan WFH tambahan bagi pegawai perempuan yang baru melahirkan. Kebijakan khusus diberikan kepada pegawai perempuan yang baru melahirkan, guna mempermudah transisi dari masa cuti ke ritme bekerja dan mengurangi potensi postpartum depression.

2. Penyediaan fasilitas daycare, ruang laktasi, dan penjaminan hak untuk menyusui selama jam kerja. Akses ke fasilitas daycare memberikan waktu yang lebih fleksibel bagi pegawai untuk menghabiskan bersama keluarga, meningkatkan interaksi positif, dan memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Melalui penyediaan ruang laktasi, ibu bekerja dapat menyusui atau memerah ASI dengan lebih teratur dan lancar. Proses menyusui yang lancar dan nyaman berdampak positif pada kesehatan bayi, ikatan emosional antara ibu dan anak, serta memberikan dukungan psikologis bagi ibu bekerja. Seluruhnya sesuai dengan amanat di UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU 17/2023 tentang Kesehatan, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU 39/1999 tentang HAM.

3. Kebijakan terkait Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya. Home staff yang ditugaskan pada Perwakilan Rawan diberi kebebasan untuk memilih membawa anggota keluarga atau tidak selama masa penugasannya. Hal ini mempertimbangkan a.l. aspek keselamatan.

Home Staff yang ditempatkan pada Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya juga dapat mengambil cuti karena alasan penting dalam rangka memulihkan kondisi kejiwaan, tanpa harus menunggu masa penugasan selama 1 tahun di Perwakilan. Cuti dimaksud tidak mengurangi hak cuti lainnya. Di samping itu, Home Staff pada Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya diberikan Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA).

4. Seminar 'Meningkatkan Kesadaran Kaum Ibu untuk Menggugah Semangat Generasi Muda dalam Bela Negara' pada 19 Juni 2022 oleh KJRI Perth dalam rangka memperingati Hari Pancasila ke-77. Seminar diinisiasi DWP KJRI Perth bekerjasama dengan Dharma Pertiwi, organisasi istri TNI. Hadir sebagai narasumber Kolonel CHB Tomy Arvianto, Atase Militer KBRI Canberra. Seminar dibuka Korjen RI Perth dan dihadiri DWP dari beberapa perwakilan RI. Seminar menyepakati kesetaraan 98 peran orangtua untuk menanamkan semangat cinta tanah air kepada anak-anak sejak usia dini.

3. Partisipasi Masyarakat

Apakah masyarakat terlibat dalam pencapaian output sebagaimana dimaksud pada pertanyaan nomor 2. Sebutkan dan lampirkan!

Nilai Maksimal: 25.00

Nilai: 25.00

Jawaban:

Ya (Lampirkan Nama Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, Media, dan Akademisi yang mendukung masing-masing output; dan lampirkan bukti)

- ☒ Lembaga Masyarakat
- ☒ Media massa
- ☒ Dunia usaha
- ☒ Akademisi
- ☒ Lainnya

☐ Tidak

Catatan:

Kerja sama ini tercermin antara lain dalam pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-15 yang telah diselenggarakan pada 8 Desember 2022. Di sela kegiatan tersebut, Indonesia bersama dengan Qatar memimpin bersama pertemuan International Conference on Afghan Women's Education (ICAWWE). Tujuannya adalah untuk melakukan tukar pandangan mengenai bagaimana situasi di Afghanistan, menegaskan dukungan terhadap rakyat Afghanistan, termasuk tentunya perempuan, dan bagaimana kita semua dapat memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan di Afghanistan terutama mengenai masalah pendidikan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh wakil pemerintah, wakil NGOs, Filantropis dan lain-lain.

Dunia usaha juga terlibat dalam pencapaian output tersebut. Pada tahun 2022, penyelenggaraan INA-LAC Business Forum dimanfaatkan sebagai wadah untuk mendorong partisipasi women entrepreneurship. Dengan memanfaatkan platform digital ina-access.com, kegiatan INA-LAC Business Forum 2022 juga menjadi wadah untuk memfasilitasi pertemuan bisnis UKM, khususnya yang dikelola perempuan Indonesia untuk menjalin hubungan dagang dengan perusahaan dari Kawasan Amlatkar.

Dalam beberapa kesempatan sosialisasi dan pembangunan kapasitas kepada diaspora WNI di Hong Kong dan PMI, KJRI Hong Kong mengangkat isu anti diskriminasi termasuk dari segi gender yang bekerja sama dengan Equal Opportunity Commission (EOC) Hong Kong.

4. Program K/L yang berbasis kewilayahan dan perspektif gender

Apakah K/L memiliki program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender hingga tingkat desa/kelurahan? (contoh: Provinsi Peduli HAM, Kabupaten/Kota Sehat, dll)

Nilai Maksimal: 30.00

Nilai: 30.00

Jawaban:

Jika Ya, sebutkan

- ☒ 1) Tingkat Provinsi
- ☒ 2) Tingkat Kabupaten/Kota
- ☒ 3) Tingkat Desa/Kelurahan

☐ Tidak

Catatan:

Kemenlu memiliki program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender hingga tingkat Perwakilan RI di luar negeri. Program dimaksud, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam beberapa kesempatan sosialisasi dan pembangunan kapasitas kepada diaspora WNI di Hong Kong dan PMI, KJRI Hong Kong mengangkat isu anti diskriminasi termasuk dari segi gender yang bekerja sama dengan Equal Opportunity Commission (EOC) Hong Kong.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) melalui program BETA SIAGA yang telah dilaksanakan a.l pada: Pelatihan Hak Asasi Perempuan di Australia bagi Penduduk Migran dalam Kaitannya dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Adelaide, South Australia pada 08 Mei 2022 (YouTube link: https://www.youtube.com/watch?v=tD_PScOUlvM)

Di samping itu, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri juga senantiasa aktif dalam melibatkan pemerintahan tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kelurahan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan berbasis kewilayahan dengan mengintegrasikan perspektif gender, salah satunya adalah KRI Vanimo yang telah mengadakan kegiatan penguatan ekonomi bagi kalangan wanita, dengan menggandeng Pemprov Papua dan Asosiasi Perempuan setempat.

5. Outcome K/L yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender

Apakah K/L mendukung outcome berikut?

Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Nilai Maksimal: 15.00

Nilai: 15.00

Jawaban:

Ya

- ☒ 1) Bidang Pendidikan
- ☒ 2) Bidang Kesehatan
- ☒ 3) Bidang Ekonomi

☐ Tidak

Catatan:

Bukti dukungan Kementerian Luar Negeri dalam mendukung terlaksananya Kesetaraan Gender telah tertuang dalam Renstra Kemenlu TA 2020-2024 dan Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi PUG dari Satker Pusat dan Perwakilan.

Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi:

Bukti dukungan Kementerian Luar Negeri dalam mendukung terlaksananya Kesetaraan Gender telah tertuang dalam Renstra Kemenlu TA 2020-2024 dan juga dalam PK dan Renaksi Menlu TA 2022.

Dalam konteks perlindungan WNI di luar negeri, upaya pemberdayaan gender telah diurusutamakan khususnya bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) perempuan dan anak-anak dari PMI yang masuk dalam kategori rentan. Diplomasi, kerja sama dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar bagi anak-anak PMI di luar negeri, penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan serta peningkatan keterampilan PMI di Perwakilan RI di luar negeri, penyusunan pedoman manajemen shelter (tempat tinggal sementara/TSS) dan pelayanan publik yang sensitif gender dan pengawasan implementasinya, serta peningkatan kapasitas pejabat fungsional diplomat terkait isu-isu gender adalah beberapa upaya penting dalam memastikan perlindungan WNI di luar negeri yang inklusif.

5. Outcome K/L yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender

Apakah K/L mendukung outcome berikut?

Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya

- ☒ Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan
- ☒ Bidang Ekonomi (sama dengan butir 5a.3)
- ☒ Peningkatan Profesionalisme Perempuan

☐ Tidak

Catatan:

Bukti dukungan Kementerian Luar Negeri dalam mendukung terlaksananya Kesetaraan Gender telah tertuang dalam Renstra Kemenlu TA 2020-2024 dan juga dalam PK dan Renaksi Menlu TA 2022.

>>kutipan Renstra 2020-2024 >> "Capaian kinerja Kementerian Luar Negeri melalui forum IORA sepanjang tahun 2017-2018 diantaranya menghasilkan berbagai perjanjian kerja sama strategis dan konsolidasi kelembagaan yang meliputi berbagai bidang, seperti: countering terrorism and violent extremism, blue economy, pengembangan perikanan berkelanjutan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, persamaan gender dan penguatan ekonomi kaum wanita"

Kemlu memberikan kesempatan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk menempuh jenjang pendidikan S2 dan S3, peningkatan kapasitas pegawai perempuan, keterwakilan perempuan dalam struktural dan juga Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri.

5. Outcome K/L yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender

Apakah K/L mendukung outcome berikut?

Penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nilai Maksimal: 0.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

Ya

☒ Bidang Kesehatan (sama dengan butir 5a.2)

☒ Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan (sama dengan butir 5b.1)

☒ Bidang Ekonomi (sama dengan butir 5a.3)

☒ Bidang Pendidikan (sama dengan butir 5a.1)

☐ Tidak

Catatan:

Bukti dukungan Kementerian Luar Negeri dalam mendukung penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) telah tertuang dalam Renstra Kemenlu TA 2020-2024 dan juga dalam PK dan Renaksi Menlu TA 2022.

>>kutipan Renstra Kemlu 2020-2024

"Di IORA, Indonesia merupakan salah satu negara pendorong (leading countries) pada area kerja sama prioritas Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan akan terus memperkuat kerja sama di bidang ini, termasuk melalui berbagai inisiatif pada Working Group on Women's Economic Empowerment (WGWE).

Sebagai anggota ekonomi APEC, Indonesia berpartisipasi aktif pada Policy Partnership on Women and the Economy (PPWE), yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi dan partisipasi perempuan dalam perekonomian dan mengkoordinasikan kegiatan gender di APEC"

"Dalam konteks perlindungan WNI di luar negeri, upaya pemberdayaan gender akan terus diarusutamakan khususnya bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) perempuan dan anak-anak dari PMI yang masuk dalam kategori rentan. Diplomasi, kerja sama dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar bagi anak-anak PMI di luar negeri, penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan serta peningkatan keterampilan PMI di Perwakilan RI di luar negeri, penyusunan pedoman manajemen shelter (tempat singgah sementara/TSS) dan pelayanan publik yang sensitif gender dan pengawasannya implementasinya, serta peningkatan kapasitas pejabat fungsional diplomat terkait isu-isu gender adalah beberapa upaya penting dalam memastikan perlindungan WNI di luar negeri yang inklusif."

Isu women, peace and security, akan tetap menjadi perhatian politik luar negeri Indonesia. Indonesia juga akan terus mendorong dan mempromosikan peran perempuan dalam perdamaian melalui implementasi ASEAN Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security, UN Resolution 1325: Women, Peace and Security, dan komitmen ASEAN-IPR terhadap pengarusutamaan gender.

5. Outcome K/L yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender

Apakah K/L mendukung outcome berikut?

Penurunan angka kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

☒ Ya

☐ Tidak

Catatan:

Ya, Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan SE Menlu No/31 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Bukti dukung sebagaimana terlampir.

Sebagai tindak lanjut, Kemlu telah membentuk tim penerima pengaduan tindak kekerasan seksual pada masing-masing Satker dan Perwakilan RI di luar negeri. Kemlu juga memiliki layanan konseling bagi korban tindak kekerasan seksual di lingkungan kerja. Pada tahun 2022, Kemlu menjajaki rencana pengadaan layanan psikiater serta telah melaksanakan Bimtek Penanganan Tindak Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja.

Upaya penurunan angka kasus kekerasan terhadap perempuan juga sudah direfleksikan pada Renstra Kemenlu TA 2020-2024 dan juga dalam PK dan Renaksi Menlu TA 2022.

>>Kutipan Renstra Kemlu 2020-2024

"Arah Kebijakan peningkatan pengaruh kepemimpinan dan peran Indonesiadalam Kerja Sama Internasional, memiliki strategi antara lain:

- Memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam bidang pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka kerja sama bilateral, regional dan multilateral, terutama melalui implementasi Instrumen HAM internasional seperti Konvensi Penghapusan Diskriminasiterhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women/CEDAW), serta komitmen berbagai kesepakatan internasional seperti BPfA dan SDGs.

- Mempromosikan perlindungan pekerja migran, khususnya perempuan, termasuk memfasilitasi berbagai resolusi PBB di Dewan HAM PBB maupun Komite III MU PBB untuk menghilangkan kekerasan terhadap pekerja migran.

5. Outcome K/L yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender

Apakah K/L mendukung outcome berikut?

Lainnya (sebutkan, yang terkait)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

☒ Ya

☐ Tidak

Catatan:

Bukti dukungan Kementerian Luar Negeri dalam mendukung terlaksananya Kesetaraan Gender telah tertuang dalam Renstra Kemenlu TA 2020-2024 dan juga dalam PK dan Renaksi Menlu TA 2022.

>> Kutipan Renstra Kemlu 2020-2024

Arah kebijakan peningkatan infrastruktur diplomasi berbasis teknologi informasi, memiliki strategi antara lain:

" Memperkuat pengarusutamaan gender dalam organisasi, khususnya penganggaran yang mengadopsi pengarusutamaan gender, dalam rangka membangun sistem manajerial dan infrastruktur yang responsif terhadap isu pengarusutamaan tersebut. "

Mendorong norm setting baik di tingkat kelembagaan Kemenlu maupun di tingkat internasional.

6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender

Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender?
Ruang Laktasi

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

☒ Ya, Lampirkan
☐ Tidak ada

Catatan:

Ruang laktasi dan Day Care.
Saat ini Kemlu memiliki beberapa Ruang Laktasi disetiap gedung Kementerian Luar Negeri.

<https://youtu.be/2Lballv2N3A?si=TDakSwsSG-CQCAtk> (mohon cek link terlampir)

6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender
Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender?
Tempat Penitipan Anak

Nilai Maksimal: 20.00

Nilai: 20.00

Jawaban:

☒ Ya, lampirkan!
☐ Tidak ada

Catatan:

Ruang laktasi dan Day Care.

<https://youtu.be/2Lballv2N3A?si=TDakSwsSG-CQCAtk> (mohon cek link terlampir)

6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender
Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender?
Layanan Perlindungan Hak Perempuan internal K/L (informasi, pengaduan, konseling, layanan rujukan, hotline, dll)

Nilai Maksimal: 20.00

Nilai: 20.00

Jawaban:

☒ Ya, lampirkan!
☐ Tidak ada

Catatan:

Ya, Kementerian Luar Negeri memiliki layanan perlindungan hak perempuan yang sangat komprehensif. Termasuk hotline pelaporan yang didukung oleh Tim Inspektorat Jenderal dan BSDM.

Kemlu telah memiliki hotline khusus pengaduan tindakan pelecehan seksual yang dikelola langsung oleh Biro SDM dengan nomor: 0811-865-1654.

Selain itu, Kemlu telah memiliki ruangan khusus konseling Psikolog yang berada di dalam Gedung One-Desk Service (ODS) Kementerian Luar Negeri. Pada tahun 2022 Kementerian Luar Negeri juga telah mencanangkan ketersediaan layanan psikiater.

6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender
Berapa jumlah perempuan yang mendapatkan manfaat layanan Perlindungan Hak Perempuan setiap tahun? (butir 6a, 6b, 6c)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

☒ Data tersedia. Sebutkan!
☐ Data tidak tersedia

Catatan:

Pengguna Daycare pada tahun 2022 adalah 265 orang

Layanan Pengaduan tahun 2022 tercatat 103 perempuan melaporkan pengaduan dan sudah ditindaklanjuti.

6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender
Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender?
Sarana Inklusi dan/atau Disabilitas (Ramp, TKD)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

☒ Ya, lampirkan!
☐ Tidak

Catatan:

Sarana & Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas di Kementerian Luar Negeri:

1. Ramp/Bidang Landai;
2. Parkir Khusus Untuk Penyandang Disabilitas;
3. Toilet Khusus Untuk Penyandang Disabilitas;
4. Lift bagi Penyandang Disabilitas.

Toilet Disabilitas dan Mushola terpisah pada Ruang Pelayanan KJRI Johor Bahru
<https://youtu.be/kZ-8i9qxqBU?si=GUm6r6MAfzXjRtdk>

Sarana & Prasarana yang Responsif Gender di Kementerian Luar Negeri seperti Mushola dan tempat wudhu terpisah antara pria dan wanita.

Museum KAA sebagai museum ramah disabilitas <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2424/berita/museum-kaa-canangkan-diri-sebagai-museum-ramah-disabilitas>
Kemlu juga telah memiliki Klinik Tingkat I yang memiliki laboratorium umum, dokter spesialis saraf, dan perencanaan psikiater dari tahun 2022 yang telah diimplementasikan dan berjalan di tahun 2023.

Penyediaan ruang konseling baru psikolog di ODS

6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender

Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender?
Lainnya, sebutkan!

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

- ☒ Ya, lampirkan!
☐ Tidak

Catatan:

One Day Service (ODS) yang merupakan pusat layanan administrasi terintegrasi pegawai Kemlu untuk mengurus dokumen-dokumen seperti cacah jiwa, tunjangan pasangan, dan kenaikan gaji berkala.

Rencana pembangunan Ruang Tunggu Sopir yang didalamnya ada fasilitas fitness center, target bisa digunakan pada tahun 2023.
https://youtube.com/shorts/piJFDCsngRA?si=CAKjxSodG_qngpuK

Mushola terpisah antara laki-laki dan perempuan yang tersebar di seluruh Gedung Kementerian Luar Negeri termasuk di Gedung Utama, Gedung Roeslan Abdul Ghani, dan Pusdiklat Kemlu.

7. Penguatan Penyelenggaraan PUG ke eksternal

Apakah K/L telah melakukan penguatan (eksternal) dalam Penyelenggaraan PUG?

Nilai Maksimal: 50.00

Nilai: 50.00

Jawaban:

- Ya, dalam bentuk: (Lampirkan)
- ☒ 1) Advokasi dan sosialisasi
☒ 2) Bimbingan Teknis
☒ 3) Pendampingan
☒ 4) Modeling
☒ 5) Lainnya
☐ Tidak

Catatan:

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri telah melakukan penguatan eksternal dalam penyelenggaraan PUG, diantaranya sbb:

- Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk Pokja PUG Perwakilan RI.

- KBRI Beirut: komitmen PUG KBRI Beirut disosialisasikan kepada staf KBRI dan masyarakat Indonesia di Lebanon dalam kesempatan kegiatan-kegiatan terkait kesetaraan gender, seperti pada Peringatan Hari Kartini tahun 2022.

- KBRI Canberra: komitmen PUG telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di KBRI Canberra, dengan mengikuti setiap kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Pusat (Kementerian Luar Negeri) dan juga Sosialisasi yang diselenggarakan oleh KBRI Canberra, pada beberapa seminar yang bertemakan pengarusutamaan gender, yakni antara lain pada tanggal 12 Desember 2022, Seminar PUG "Peningkatan Kapasitas SDM Perwakilan RI dalam penguatan Pelayanan Publik yang Responsif Gender" dan kegiatan Dharma Wanita Persatuan di KBRI Canberra tanggal 4 September 2022 tentang Pelatihan Make Up dan Sanggul, dimana dilakukan paparan singkat tentang PUG dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender.

- KBRI Ottawa: komitmen PUG sudah disosialisasikan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Ottawa beserta jajaran staf baik home staff maupun local staff menyusul ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Ottawa mengenai penerapan pengarusutamaan gender dan setiap setelah diselenggarakannya kegiatan bimtek dan sosialisasi oleh Pokja PUG di Kemlu Pusat. Komitmen PUG juga senantiasa menjadi bagian bahasan yang diangkat dalam berbagai kesempatan penyusunan bahan substansi pertemuan Duta Besar dengan mitra setempat, rapat-rapat internal KBRI Ottawa dan perundingan-perundingan seperti COP15-Convention Biodiversity yang berlangsung di Montreal, December 2022 serta putaran perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).

- KBRI Wellington: komitmen sudah disosialisasikan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Wellington beserta jajaran staf baik home staff maupun local staff menyusul ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Wellington mengenai penerapan pengarusutamaan gender dan setiap setelah diselenggarakannya kegiatan bimtek dan sosialisasi oleh Pokja PUG di Kemlu Pusat. Selain itu juga telah dilakukan serangkaian kegiatan sosialisasi seperti "Seminar Sosialisasi Raising Awareness terkait Kanker Payudara pada kegiatan ASEAN Ladies Circle" dan "Seminar Bincang Kesehatan Perempuan dalam rangka Hari Ibu".

- KBRI London: Pada Semester II 2022, memastikan didapatkannya pendampingan hukum bagi orang tua kasus anak WNI korban modern slavery dimana Ibu kandung menjadi pihak terberat yang harus memberikan burden of proof atas proses pemindahan hak asuh (kasus masih berjalan).

7. Penguatan Penyelenggaraan PUG ke eksternal

Apakah K/L telah melakukan penguatan (eksternal) dalam Penyelenggaraan PUG?

Nilai Maksimal: 30.00

Nilai: 30.00

Jawaban:

- Ya, dilakukan pada:
- ☒ a) PD tingkat provinsi
☒ b) PD tingkat kabupaten/kota
☒ c) Pemerintah Desa
☒ d) Masyarakat
☐ Tidak

Catatan:

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, Kementerian Luar Negeri memiliki fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Pasal 4 dan Pasal 5 Permenlu 6 Tahun 2021). Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri senantiasa melibatkan jajaran pemerintah daerah dan unsur masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan PUG, diantaranya sbb:

- KRI Vanimo: Menggandeng Asosiasi Perempuan setempat dan Pemprov Papua untuk bermitra dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penguatan ekonomi, utamanya bagi kalangan wanita.

- KBRI Beirut: Melibatkan masyarakat Indonesia di Lebanon dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi komitmen PUG KBRI Beirut

- KBRI Brussels: Bekerja sama dengan elemen masyarakat di kota Antwerpen, KBRI menyelenggarakan Indonesian Night yang dihadiri oleh sekitar 300 peserta. Pengisi acara dan panitia kegiatan tersebut sebagian besar merupakan WNI dan diaspora perempuan.

- KBRI Copenhagen: pelaksanaan Webinar dalam rangka Hari Kartini 2022 dengan Topik: Let's Talk About Women and Mental Health", yang diikuti oleh masyarakat umum dan sejumlah DWP Perwakilan RI.

- Dalam beberapa kesempatan sosialisasi dan pembangunan kapasitas kepada diaspora WNI di Hong Kong dan PMI, KJRI Hong Kong mengangkat isu anti diskriminasi termasuk dari segi gender yang bekerja sama dengan Equal Opportunity Commission (EOC) Hong Kong.

5. Pemantauan

1. PUG dalam Pemantauan

Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk memantau penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pemantauan)?

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya, sebutkan!

☒ 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I

☐ 2) Pedoman/Petunjuk Teknis

☐ 3) Lainnya

☐ Tidak

Catatan:

Kemlu telah memiliki regulasi teknis yang mengatur PUG dalam pemantauan. Kebijakan ini berupa panduan teknis tentang mekanisme pemantauan PUG yang dituangkan dalam bentuk pedoman/petunjuk teknis, yaitu:

1. Peraturan Menlu No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kemlu; dan
2. Keputusan Menlu No. 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kemlu dan Perwakilan RI.
3. Keputusan Sekjen.

Di level teknis atau UKE I, terdapat Keputusan UKE I yang menetapkan pembentukan Pokja PUG dan tugas Pokja yang di antaranya adalah mengimplementasikan pemantauan PUG di masing-masing UKE I.

1. PUG dalam Pemantauan

Apakah K/L melaksanakan pemantauan atas penyelenggaraan PUG secara berkala?

Nilai Maksimal: 15.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya

☐ 1) Setiap triwulan

☒ 2) Setiap semester

☐ 3) Tahunan

☐ Tidak

Catatan:

Sesuai dengan Kepmenlu Juknis PUG Tahun 2021, Forum Komunikasi PUG Kementerian Luar Negeri secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG sedikitnya setiap semester.

Pemantauan Semester I dilakukan pada Semester II tahun berjalan, sedangkan pemantauan Semester II dilakukan Semester I tahun berikutnya.

6. Evaluasi

1. PUG dalam Evaluasi

Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk mengevaluasi Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Evaluasi)?

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya (Lampirkan)

☒ 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I

☐ 2) Pedoman/Petunjuk Teknis

☐ 3) Lainnya

☐ Tidak ada

Catatan:

Kementerian Luar Negeri memiliki regulasi untuk mengevaluasi penyelenggaraan PUG. Kebijakan ini berupa panduan teknis tentang mekanisme evaluasi PUG yang dituangkan dalam bentuk pedoman/petunjuk teknis, yaitu:

1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
2. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Di level teknis atau UKE I, terdapat Keputusan UKE I yang menetapkan pembentukan Pokja PUG dan tugas Pokja yang di antaranya adalah mengimplementasikan evaluasi PUG di masing-masing UKE I.

1. PUG dalam Evaluasi

Apakah K/L melakukan Evaluasi Penyelenggaraan PUG setiap tahun?

Persentase UKE I yang dievaluasi

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

☒ Ya. Lampirkan!

☐ Tidak

Catatan:

Nilai= 100%

Pokja PUG Kementerian Luar Negeri melakukan evaluasi penyelenggaraan PUG setiap tahun terhadap seluruh Satker Pusat dan Perwakilan RI. Hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PUG, termasuk isu-isu prioritas untuk mendukung implementasi PUG Kementerian Luar Negeri.

Selain itu, evaluasi terhadap penyelenggaraan PUG juga dilakukan bersamaan dengan evaluasi kinerja UKE I dan UKE II setiap tahunnya. Terlampir sample Laporan Hasil Evaluasi Kinerja UKE I tahun 2022.

1. PUG dalam Evaluasi

Apakah K/L melakukan Evaluasi Penyelenggaraan PUG setiap tahun?

Persentase UKE II yang dievaluasi

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

☒ Ya. Lampirkan!

☐ Tidak

Catatan:

Nilai= 100%

Pokja PUG melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUG seluruh UKE II setiap tahun.

1. PUG dalam Evaluasi

Apakah hasil evaluasi Penyelenggaraan PUG ditindaklanjuti?

Persentase UKE I yang menindaklanjuti hasil evaluasi

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

☒ Ya. Lampirkan!

☐ Tidak

Catatan:

Nilai= 100%

Seluruh evaluasi penyelenggaraan PUG telah ditindaklanjuti.

Forum Komunikasi PUG telah memberikan rekomendasi kepada Itjen untuk menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi PUG oleh Itjen (Itjen diminta untuk benchmarking dengan K/L lain untuk menyiapkan mekanisme tersebut dan bimtek PPRG bagi auditor).

1. PUG dalam Evaluasi

Apakah hasil evaluasi Penyelenggaraan PUG ditindaklanjuti?

Persentase UKE II yang menindaklanjuti hasil evaluasi

Tulis nilai persentase pada catatan!

(Format Nilai=...% tanpa spasi & tanpa angka di belakang koma, Contoh: Nilai=82%)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

☒ Ya. Lampirkan!

☐ Tidak

Catatan:

Nilai=100%

Seluruh hasil evaluasi penyelenggaraan PUG UKE II telah ditindaklanjuti.

1. PUG dalam Evaluasi

Apa saja penghargaan terkait Penyelenggaraan PUG, yang diperoleh K/L selama satu tahun terakhir?

Nilai Maksimal: 0.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

Ya, sebutkan dan lampirkan!

☒ Tingkat Internasional

☒ Tingkat Nasional

☐ Tidak ada

Catatan:

Pada tingkat internasional:

1. Kemlu terus menerima apresiasi atas keberhasilan Optimalisasi Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB sebagai 10 besar (urutan ke-7) negara pengirim pasukan perdamaian perempuan.
2. Indonesia sebagai Ketua W20 dan menghasilkan beberapa inisiatif kerja sama dengan negara-negara G20 untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan dengan mengimplementasikan Leaders' Declaration W20. (<https://www.w20indonesia.org/>)

Pada tingkat nasional:

1. Menlu RI menerima penghargaan Femela Award Women in Government of the Year
2. Menlu RI menerima penghargaan She Inspires Award dari Kumparan
3. Menlu RI Menerima Penghargaan Rakyat Merdeka Award 2022

7. Pengawasan

1. PUG dalam Pengawasan

Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk pengawasan internal atas Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pengawasan)?

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

Ya (Lampirkan)

☒ 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I

☐ 2) Pedoman/Petunjuk Teknis

☐ 3) Lainnya

☐ Tidak

Catatan:

Kementerian Luar Negeri memiliki regulasi untuk pengawasan internal atas penyelenggaraan PUG. Kebijakan ini berupa panduan teknis tentang pengawasan PUG yang dituangkan dalam bentuk pedoman/petunjuk teknis, yaitu:

1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
2. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 03/B/LA/X11/2021/01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Pengawasan internal atas penyelenggaraan PUG merupakan salah satu tugas dari Pokja PUG, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 11 Permenlu No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Kemlu sedang menyusun petunjuk teknis pedoman pengawasan PUG.

1. PUG dalam Pengawasan

Nilai Maksimal: 100.00

9. INOVASI

1. Inovasi Penyelenggaraan PUG yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender

Apakah K/L memiliki inovasi dalam rangka mewujudkan kesetaraan Gender sesuai tugas pokok dan fungsi K/L?

Nilai Maksimal: 100.00

Nilai: 100.00

Jawaban:

[X] Ya, Jelaskan dan Lampirkan buktinya
[] Tidak

Catatan:

Pada tahun 2022, Kementerian Luar Negeri memiliki berbagai inovasi dalam mewujudkan Kesetaraan gender, baik internal (dalam bentuk digitalisasi PUG, Kemlu Sisterhood, instrumen hukum terbaru, capacity building, dan infrastruktur) maupun inisiatif di forum bilateral, regional, dan multilateral, yaitu:

INOVASI KESETARAAN GENDER INTERNAL

A. Inovasi pada Aspek Kebijakan

1. Inisiasi Digitalisasi PUG

Digitalisasi PUG dilatarbelakangi oleh kondisi mutasi luar negeri pegawai Kementerian Luar Negeri yang cukup tinggi dan adanya kebutuhan untuk mengumpulkan dokumen PUG yang masih tersebar di Unit Organisasi Kemlu dan Perwakilan.

Pada akhir tahun 2022, Pokja PUG Kemlu mulai menyusun konsep pembangunan Website PUG sebagai wadah digitalisasi PUG Kemlu. Pengembangan website PUG sebagai bentuk transparansi di internal Kemlu. Selain itu, website PUG bertujuan sebagai media monitoring dan evaluasi bagi Pokja PUG Unit Kerja dan digitalisasi dokumen PUG Kemlu untuk memudahkan dalam penyusunan laporan PUG Kemlu. Saat ini, website PUG dapat diakses melalui jaringan internal Kemlu dengan alamat situs <https://pug.kemlu.go.id/>

2. Kemlu Sisterhood;

Kemlu Sisterhood diluncurkan pada Agustus 2022, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai perempuan Kemlu melalui sarana diskusi dan mentorship. Program ini dicanangkan sebagai wadah saling berbagi sesama pegawai perempuan. Adapun topik diskusi beragam, mulai dari peningkatan kapasitas, cara menyeimbangkan kehidupan karir dan rumah tangga, hingga inovasi kebijakan untuk menciptakan "support system" yang kuat. Selain itu, jumlah pegawai perempuan di lingkungan Kemlu yang terus bertambah, sehingga perlu segera ada program untuk menghilangkan disparitas gender.

3. Instrumen Hukum Terbaru:

Untuk menajajaki usulan untuk meningkatkan status Surat Edaran (SE) Menlu menjadi Permenlu dengan pertimbangan lebih memiliki kekuatan hukum dibandingkan SE, Kemlu menyusun kajian mengenai Penguatan Kelembagaan dan Intervensi Kebijakan bagi terciptanya lingkungan kerja yang aman dari tindakan pelecehan seksual sesuai amanat SE Menlu No. 31 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Kajian meninjau dari 3 aspek, yaitu 1) Elemen peningkatan kelembagaan; 2) Intervensi kebijakan, dan 3) Aspek infrastruktur untuk langkah pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual.

4. Disusunnya Naskah Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

Petunjuk teknis ini disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Luar Negeri nomor SE/00031/KP/11/2021/03 Tahun 2021. Juknis bertujuan untuk menyediakan pedoman bagi Pejabat Penerima Pengaduan Tindakan Pelecehan Seksual dalam menangani pengaduan informal maupun formal, guna memudahkan Pejabat Penerima Pengaduan Tindakan Pelecehan Seksual dalam menyelenggarakan penanganan pengaduan.

5. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Shelter di Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pedoman Pendampingan WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri yang memperhatikan kebutuhan gender para penerima layanan, TA 2022;

6. Penyusunan kajian mengenai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya (PRPB): analisis rekomendasi kebijakan responsif gender di PRPB

Kajian ini melihat beberapa aspek dalam Permenlu No. 5 Tahun 2020 mengenai PRPB yang belum sepenuhnya diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh pegawai di PRPB. Kajian mengangkat isu mengenai PRPB dan program prioritas Kemlu di bidang Diplomasi Ekonomi, permasalahan dan kendala yang dihadapi pegawai Kemlu di PRPB, dan dampak penugasan PRPB bagi pegawai yang bersangkutan. Kajian juga membandingkan perwakilan dari negara ASEAN lainnya di negara akreditasi PRPB, keberadaan Diplomat/Pegawai Perempuan di PRPB; ketentuan-ketentuan dan fasilitas yang diberikan di perwakilan tersebut, khususnya dalam hal pemberian fasilitas bagi pegawai perempuan-nya yang ditempatkan di negara tersebut; sarana dan prasarana, dll.

Kesimpulan kajian yaitu tidak ada pembatasan gender saat penentuan penempatan PRPB; Untuk mengoptimalkan kinerja di PRPB dan menguatkan mekanisme merit system untuk penempatan di PRPB perlu dilakukan peninjauan dan perbaikan ketentuan pada Permenlu No. 5 Tahun 2020; Perlu adanya perbaikan fasilitas bagi pegawai yang ditempatkan di wilayah PRPB terutama terkait hak-hak seperti cuti, konsultasi psikologi, pembekalan, dan pemberian penghargaan yang sesuai.

- B. Capacity Building

7. Seluruh SDM Kementerian Luar Negeri (Pusat dan Perwakilan RI), termasuk SDM bidang Hukum telah terlatih substansi terkait konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan, penganggaran responsif gender, dan parameter kesetaraan gender.

Di tahun 2022, terdapat 74 orang SDM bidang Hukum yang tersebar di berbagai Satker di Kementerian Luar Negeri.

Pada tahun 2022, Kemlu telah melaksanakan Bimtek PUG untuk seluruh Satker Pusat dan Perwakilan RI dan secara khusus telah melaksanakan pelatihan Training of Trainers untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) secara luring di Pusdiklat Kemlu pada tanggal 29-30 Juni dan 1 Juli 2022. Kegiatan diikuti oleh 20 Pejabat dari 8 Satuan Kerja Eselon I, 6 Satuan Kerja Eselon II Sekretariat Jenderal (laporan dan sertifikat terlampir). Seluruh peserta Bimtek dan TOT tersebut telah menjadi bagian integral dalam memberikan pemahaman seluruh SDM di Satker masing-masing terkait pelaksanaan PUG di Kemlu. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Luar Negeri RI Nomor SE/00031/KP/11/2021/03 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kemlu, telah diselenggarakan pula Bimbingan Teknis bagi Pejabat Penerima Pengaduan Tindakan Pelecehan Seksual, yang diikuti oleh Pejabat Penerima Pengaduan Tindakan Pelecehan Seksual di UKE I dan UKE II di Pusat, serta Perwakilan RI.

8. Kemlu juga telah menyediakan hotline khusus pengaduan tindakan pelecehan seksual, yang dikelola langsung oleh Biro SDM.

9. Menindaklanjuti Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 03/B/LA/XII/2021/01 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, APIP Kementerian Luar Negeri telah melakukan benchmarking dengan Kementerian Kesehatan guna menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi serta audit terhadap penyelenggaraan PUG Kementerian Luar Negeri. Sambil menunggu pedoman pengawasan penyelenggaraan PUG di tingkat nasional, APIP Kementerian Luar Negeri tengah menyiapkan konsep Keputusan Irjen tentang Pengawasan PUG Kementerian Luar Negeri.

C. Infrastruktur

10. Saat ini Kemlu terus membenahi infrastruktur fisik dan infrastruktur non fisik (jaringan), sebagai upaya dalam pencegahan tindakan pelecehan seksual, kesetaraan, dan keadilan. Pembenahan infrastruktur fisik seperti penambahan titik lampu penerangan agar jalan, basement, dan ruang kerja terjaga keamanan dan kenyamanannya, penambahan tempat parkir khusus bagi difabel dan karyawan Kemlu dengan anak (untuk dititipkan ke daycare), serta upgrade fasilitas daycare dan perbaikan penerangan di ruang laktasi.

Kemlu juga sedang mempersiapkan tanda peringatan "area bebas dari kekerasan seksual", serta video singkat dan materi sosialisasi atau publikasi Surat Edaran sebagai bagian upaya menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran pegawai maupun pengunjung.

Dari sisi penanganan infrastruktur jaringan, Kemlu melakukan pemblokiran situs yang bermuatan pornografi melalui perangkat firewall yang dimiliki oleh Kemlu. Dengan merujuk Surat Edaran Menlu No. 31 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual, Kemlu akan melakukan pemblokiran situs yang bermuatan pornografi secara lebih ketat mengacu kepada TRUST+Positif Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) sebagai referensi atau rujukan database perangkat firewall. Namun, Kemlu memiliki keterbatasan dalam membatasi konten pornografi yang masuk melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter dikarenakan aplikasi media sosial tersebut dioperasikan menggunakan perangkat dan akun pribadi masing-masing pegawai.

Hal ini menunjukkan, meskipun penanganan infrastruktur fisik dan non fisik (jaringan) dapat diamankan, kesadaran dan kepedulian pegawai juga berperan dalam mencegah dan menindak pelecehan seksual di lingkungan Kemlu. Terdapat whistle-blowing system yang dikelola Inspektorat Jenderal Kemlu yang bisa dimanfaatkan untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual. Selain itu, pada level Satuan Kerja Eselon II, telah ditunjuk Liaison Officer (LO) sebagai penghubung untuk membantu pencegahan tindakan pelecehan seksual. Selain itu, sosialisasi yang masih mengenai Surat Edaran Menlu No. 31 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di lingkungan kerja perlu terus dilakukan.

INISIATIF DI FORUM BILATERAL, REGIONAL, DAN MULTILATERAL/GLOBAL

- D. Inisiatif di Forum Bilateral

11. International Conference on Afghan Women's Education

Kemlu mewakili Indonesia telah menyelenggarakan International Conference on Afghan Women's Education di Bali pada Desember 2022. Konferensi telah menghasilkan The Bali Message yang menyepakati

pentingnya akses pendidikan bagi perempuan Afghanistan agar Afghanistan dapat memperoleh perdamaian abadi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan juga menjaga kesejahteraan dan stabilitas kawasan. Untuk itu, disepakati adanya berbagai program untuk perempuan Afghanistan seperti beasiswa dan pelatihan.

12. Penjajakan Working Spouse Agreement (WSA) RI-Swiss

Penjajakan Working Spouse Agreement (WSA) antara Indonesia dengan Swiss merupakan langkah awal untuk memfasilitasi pasangan diplomatik Indonesia untuk dapat bekerja di negara tujuan penugasan pejabat diplomatik, yang selama ini belum dimungkinkan. WSA memiliki manfaat yang signifikan bagi pasangan diplomat, seperti pemberdayaan pasangan diplomat, mendukung aspirasi karir dan produktivitas, mengurangi risiko perselisihan di lingkungan perwakilan, dan meningkatkan hubungan bilateral.

13. Penyelenggaraan Hassan Wirajuda Pelindungan Award (HWP) yang sensitive gender.

Dalam seluruh rangkaian kegiatan HWP, Kemlu memastikan kesetaraan gender pada unsur panitia pelaksana, juri, nominator penerima penghargaan dan isu/kasus yang diselesaikan dan diperjuangkan. Para penerima HWP adalah diplomat, jurnalis, kepala desa, PNS, dan masyarakat madani. Ini menunjukkan bahwa perlindungan WNI bukan lagi tugas pekerjaan eksklusif bagi gender tertentu. Pemberian HWP kepada perempuan, menunjukkan bahwa perempuan mampu berperan aktif dalam pelaksanaan misi perlindungan WNI, dalam berbagai bentuk. Para penerima HWP memberikan pelayanan dan perlindungan secara langsung, memberikan advokasi bagi korban KDRT, membangun sistem reintegrasi dengan fokus pada anak-anak PMI, serta membangun sistem rujukan bagi WNI perempuan yang bermasalah di luar negeri.

14. Penerbitan Majalah Masyarakat ASEAN edisi ke-31 dan ke-32,

Kemlu menerbitkan majalah Masyarakat ASEAN edisi ke-31 dan ke-32 yang antara lain memuat artikel yang mengedepankan tentang pengarusutamaan gender dan partisipasi dari penulis baik laki-laki maupun perempuan.

E. Inisiatif di Forum Regional

15. ASEAN Committee on Women

Kemlu mewakili Indonesia telah berpartisipasi pada Dialog Tingkat Menteri ASEAN dan Amerika Serikat tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan secara virtual. Dialog ini menyoroti berbagai tantangan kompleks yang dihadapi perempuan dan anak perempuan ASEAN di tengah perubahan lanskap global dan regional, termasuk dampak pandemi COVID-19. ASEAN mengadopsi pendekatan keseluruhan ASEAN dalam memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Secara khusus, perspektif gender sedang dijalani dan dilembagakan pada Badan Sektor ASEAN (misalnya pada sektor manajemen bencana, UMKM, tenaga kerja).

16. Research Project: Aceh Post Tsunami Recovery Peace Building

Kemlu telah memfasilitasi partisipasi Indonesia pada ASEAN-IPR Indonesia bekerja sama dengan JAIF telah melaksanakan proyek riset dimaksud yang tercantum pada Joint Communique yang diadopsi pada AMM ke-55 tahun 2022. Proyek riset ini juga menekankan peran penting Perempuan dalam proses Peace Building pasca terjadinya bencana tsunami di Aceh.

17. High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI)

Kemlu mewakili Indonesia mengusulkan pemberdayaan perempuan dalam penyusunan AEC Components of the Core Elements of ASEAN Community's Post-2025 Vision yang diadopsi ASEAN Leaders pada ASEAN Summit ke 40 dan 41 yaitu "Develop inclusive supporting policies including women, youth, the elderly and MSMEs".

18. Kegiatan AICHR Consultation on Human Rights and Countering Trafficking in Persons in ASEAN

Kemlu memfasilitasi kegiatan AICHR Indonesia dan AICHR Malaysia dengan menyelenggarakan kegiatan yang membahas recognition to the rights of women, children, migrant workers, persons with disabilities. Kegiatan juga didasarkan pada ASEAN Convention against Trafficking in Persons, especially Women and Children (ACTIP) pada 2015-2016.

F. Inisiatif di Forum Multilateral/ Global

19. Commission on the Status of Women (CSW66)

Kemlu memfasilitasi partisipasi Indonesia dalam CSW66 yang dimulai dengan penyampaian pidato Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPP-PA) pada sesi General Discussion dan Ministerial Round-Table, Penyelenggaraan 2 (dua) side events terkait Presidensi Indonesia di G20 dan W20, Partisipasi Kementerian Kooperasi dan UKM dalam side event tentang "Perempuan dalam Dunia Usaha dan Kooperasi" oleh Turki, serta berpartisipasi aktif dalam pembahasan dan negosiasi outcome documents CSW.

20. Penyelenggaraan COP-4.2 Konvensi Minamata tanggal 21-25 Maret 2022.

Kemlu memfasilitasi peran Indonesia sebagai Presiden COP sekaligus tuan rumah pelaksanaan COP-4.2 Konvensi Minamata di Bali. Pertemuan telah sukses menghasilkan dokumen MC/COP.4/22, yang antara lain berkomitmen untuk mengarusutamakan gender dalam kegiatan dan program kerja Konvensi Minamata, serta mendorong program gender equality dan women empowerment, termasuk pertimbangan isu Kesehatan perempuan di sektor industri yang masih menggunakan merkuri.

21. 3rd World Conference on Creative Economy (WCCE)

Kemlu telah memfasilitasi peran Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan 3rd WCCE di Bali pada 5-7 Oktober 2022. Pertemuan pada tingkat Menteri telah berhasil mengadopsi Outcome Document berjudul "Bali Creative Economy Roadmap 2022 dan menyepakati 16 rencana aksi, dimana salah satunya adalah mendorong pembentukan ekosistem yang memastikan bahwa sektor ekonomi kreatif bersifat inklusif untuk semua termasuk untuk perempuan, pemuda dan komunitas lokal.

22. Konferensi Tingkat Menteri W20

Kemlu memfasilitasi peran aktif Indonesia sebagai Ketua W20 dengan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri W20 pada 24-25 Agustus 2022 serta pertemuan pendahuluannya sejak Februari 2022. Adapun Konferensi tersebut membahas berbagai isu mengenai pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa inisiatif kerja sama dengan negara-negara G20 untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan dengan mengimplementasikan Leaders' Declaration W20. (<https://www.w20indonesia.org/>).